

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian berbentuk deskriptif dan komparatif. Dalam penelitian ini langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menganalisis data realisasi APBD dengan menggunakan rasio keuangan, kemudian rasio tersebut dibandingkan dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan uji statistik.

Penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan objek/subjek penelitian yang berupa data-data yang sudah tersedia. Dalam melakukan penelitian, data tidak boleh dimanipulasi oleh penulis. Oleh karena itu penelitian deskriptif sering disebut sebagai penelitian noneksperimental karena data yang akan diteliti sudah tersedia baik dimasa lalu, sekarang atau dimasa mendatang.

Jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini berupa analisis dokumen yaitu pengumpulan dan pengujian dokumen berupa realisasi APBD pada kabupaten/kota di provinsi NAD dan Papua tahun 1994 – 2008.

Penelitian komparatif atau perbedaan yaitu, jenis penelitian yang membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara dua kelompok penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua. Periode penelitian yang dilakukan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2008.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono,2004). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebanyak 23 pemerintah daerah dan kabupaten/kota se-Provinsi Papua yaitu sebanyak 29 pemerintah daerah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2004). Jumlah sampel yang peneliti pakai pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD sebanyak lima pemerintah daerah, sedangkan sampel pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua yaitu sebanyak dua pemerintah daerah. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan (*judgement sampling*). Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua yang mempublikasikan realisasi APBD dalam situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) dari tahun 1994 – 2008.

2. Kabupaten/ kota se-Provinsi NAD dan Papua yang tidak mengalami pemekaran daerah atau otonomi daerah dari tahun 1994 – 2008.

Daftar Kabupaten dan Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2
Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Papua

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Jayapura
2.	Kabupaten Paniai

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 3
Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

No	Nama kabupaten/kota
1.	Kabupaten Aceh Selatan
2.	Kabupaten Aceh Tengah
3.	Kabupaten Aceh Tenggara
4.	Kabupaten Aceh Utara
5.	Kota Banda Aceh

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen realisasi APBD pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua, yang diperoleh dari website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan www.djpk.depkeu.go.id.

Periode realisasi APBD yang menjadi pengamatan penelitian ini adalah periode tujuh tahun sebelum otonomi khusus tahun anggaran (1994 – 2000) dan tujuh tahun sesudah otonomi khusus (2002 – 2008).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang digunakan yaitu realisasi APBD kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio tersebut dibandingkan dengan rasio keuangan sebelum dan sesudah otonomi khusus. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung masing-masing rasio keuangan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan sebagai variabel penelitian. Hasil perhitungan rasio-rasio ini selanjutnya digunakan sebagai data dalam pengujian statistik.

Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus-rumus rasio keuangan daerah, yaitu diantaranya: desentralisasi fiskal, efisiensi keuangan daerah, dan aktifitas keuangan daerah.

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyeenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2011) Rumusan rasio derajat desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2011) yaitu :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi fiskal : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk dapat mengukur tingkat kinerja keuangan daerah maka kita perlu membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Dari perhitungan ini kita dapat melihat seberapa besar peranan PAD terhadap TPD tersebut.

Menurut Halim (2002), ada beberapa skala interval untuk menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut yaitu:

- a. Apabila tingkat kemandirian 0%-25%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali. Maka, daerah tersebut sangat bergantung kepada pemerintah pusat (pola hubungan *instruktif*);
- b. Apabila tingkat kemandirian 25%-50%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah. Namun, campur tangan pemerintah pusat dalam hal keuangan sudah mulai berkurang. Sehingga, daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan *konsultatif*).

- c. Apabila tingkat kemandirian 50%-75%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah (pola hubungan *partisipatif*).
 - d. Apabila tingkat kemandirian 75%-100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Sehingga, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (pola hubungan *delegatif*).
2. Efisiensi Keuangan Daerah
- Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio efisiensi (Hamzah, 2006 dalam Kurniati, 2012) diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah: } \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarto;2007 dalam Kurniati; 2012). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

3. Aktifitas Keuangan Daerah

Rasio aktifitas keuangan daerah (keserasian belanja modal) dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2008):

$$\text{Aktifitas Keuangan Daerah: } \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Aktifitas (Rasio Keserasian Belanja) Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar.

3.5.2. Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan dengan menguji rasio keuangan sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, dari hasil pengujian ini diharapkan dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan antara tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua. Tahap-tahap pengujian meliputi uji normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov -Smirnov*. Dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel penelitian dengan *Paired Samples T Test* atau *Wilxocon Signed Rank Test*. Tingkat signifikansi atau nilai alfa (α) pada penelitian ini ditetapkan untuk seluruh pengujian adalah sebesar 0,05 atau (5%). Besarnya nilai alfa (α) tergantung pada keberanian membuat keputusan

yang dalam hal ini berapa besar kesalahan (yang menyebabkan resiko) yang akan ditolerir. Penjelasan tahap-tahap pengujian sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan test parametrik, sebaliknya apabila data berdistribusi tidak normal maka lebih sesuai dipilih alat uji statistik non parametrik dalam pengujian hipotesis.

Uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dipilih karena lebih peka untuk mendekripsi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2006). Hipotesis nol (H_0) dinyatakan bahwa data dari masing-masing variabel penelitian pada periode sebelum dan sesudah otonomi khusus berdistribusi normal. Penentuan normal tidaknya data ditentukan dengan cara, apabila hasil signifikasinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan ($\geq 0,05$) maka H_0 diterima maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikasi uji lebih kecil dari nilai signifikasi ($< 0,05$) H_0 ditolak maka data tersebut terdistribusi tidak normal.

3.5.2.2 Pengujian Hipotesis

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa yang paling sesuai digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan uji parametrik, yaitu *Paired Sample T Test*.

Jika data berdistribusi tidak normal maka digunakan uji non parametrik *Wilcoxon's Signed Rank Test* lebih sesuai digunakan. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam uji statistik mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006).

Kedua model penelitian pre-post atau sebelum-sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah adanya *treatment*. *Treatment* tertentu pada penelitian ini adalah peristiwa otonomi khusus. Jika *treatment* tersebut tidak berpengaruh pada subjek, maka nilai rata-rata pengukurannya adalah sama dengan atau dianggap nol dan hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti hipotesis alternatifnya (H_a) ditolak. Jika *treatment* ternyata berpengaruh, nilai rata-rata pengukuran tidak sama dengan nol (H_0) nya ditolak, yang berarti hipotesis alternatifnya (H_a) diterima.

3.5.2.3. *Paired Samples T Test* (Uji sampel berpasangan)

Paired Sample T Test atau uji T sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2006). Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan, yaitu kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua sebelum dan sesudah otonomi khusus. *Paired samples t-test* berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata (*mean*) sama.

Pengambilan keputusan:

1. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, yang berarti terdapat perbedaan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus.
2. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus.

3.5.2.4. *Wilcoxon Signed Rank Test*

Uji statistik non parametrik yang digunakan adalah dengan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Uji ini digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini *Wilcoxon Signed Rank Test* digunakan untuk mengetahui perbedaan antara tingkat kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus, dengan membandingkan masing-masing indikatornya (rasio keuangan pemerintah daerah). H_a diterima jika signifikansi $< 0,05$, dan H_a ditolak jika signifikansi $> 0,05$.